

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya yaitu kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor industri seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sangat penting, dikarenakan sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang dipercaya dapat mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Mokodompit dan Usman (2018) hal tersebut dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja yang paling besar diduduki oleh sektor UMKM dibandingkan dengan sektor yang lainnya dan juga dibuktikan dengan pertumbuhan UMKM yang semakin pesat dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Saat terjadinya krisis ekonomi, UMKM termasuk kedalam industri yang tahan dari adanya krisis ekonomi dikarenakan UMKM tidak banyak menggunakan bahan-bahan impor sehingga tidak menggunakan mata uang asing yang sering mengalami fluktuasi nilai tukar. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa setelah adanya

krisis moneter pada tahun 1998 diketahui jumlah UMKM di Indonesia tidak mengalami penurunan, tetapi jumlah UMKM mengalami peningkatan sebanyak 2,98 persen pada tahun 1999 kemudian meningkat kembali di tahun 2000 menjadi 4,94 persen (Prasetio *et al.*, 2018). Oleh karena itu krisis moneter tidak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah peluang usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk ke dalam anak perusahaan atau bukan termasuk cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai oleh usaha menengah dan usaha besar walaupun kriteria perusahaan sesuai dengan kriteria yang ada dalam Undang-Undang. Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan dan pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM). Usaha mikro merupakan jenis usaha yang memiliki aset dengan jumlah maksimal Rp.50.000.000,00 dengan total omzet maksimal Rp.300.000.000,00. Selanjutnya yang termasuk kedalam usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset sebanyak Rp.50.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00 dengan total omzet dari Rp.300.000.000,00 sampai Rp.2.500.000.000,00. Sedangkan untuk kategori yang termasuk kedalam usaha Menengah total asetnya sebanyak Rp.500.000.000,00 sampai

Rp.10.000.000.000,00 dengan total omzet sebanyak Rp.2.500.000.000,00 sampai Rp.50.000.000.000,00.

TABEL 1.1.
Data Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2018-2019

No	Indikator	Tahun 2018 (unit)	Tahun 2019 (unit)	Perkembangan Tahun 2018-2019 (%)
1.	Usaha Mikro (UMi)	63.350.222	64.601.352	1,97
2.	Usaha Kecil (UK)	783.132	798.679	1,99
3.	Usaha Menengah (UM)	60.702	65.465	7,85
4.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	64.199.606	65.471.134	1,98

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2019)

Pada Tabel 1.1. menunjukkan bahwa perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2018 sebanyak 64.199.606 unit menjadi 65.471.134 unit di tahun 2019 dengan persentase perkembangan sebesar 1,98 persen. Jika diuraikan dari Usaha Mikro (UMi) pada tahun 2018 sebanyak 63.350.222 unit mengalami peningkatan sebesar 1,97 persen menjadi sebanyak 64.601.352 unit di tahun 2019. Kemudian untuk Usaha Kecil (UK) pada tahun 2018 sebanyak 783.132 unit mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 1,99 persen menjadi sebanyak 798.679. sedangkan untuk Usaha Menengah (UM) dilihat dari perkembangan tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan perkembangan sebesar 1,98 persen dengan jumlah usaha menengah pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 60.702 unit dan pada tahun 2019 sebanyak 65.465.

Dilihat dari perkembangan UMKM di Indonesia yang cukup pesat, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan UMKM agar lebih berkembang menjadi lebih pesat lagi sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan

perekonomian di Indonesia khususnya pengangguran. Karena dengan adanya UMKM dapat membantu pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat berkurang dan perekonomian menjadi baik. Di dalam islam disebutkan bahwa pembangunan UMKM diwajibkan mempunyai kemandirian seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang mempunyai kontribusi yang besar di sektor industri atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 30 persen (Perda Nomor 3 Tahun 2021). Hal tersebut memperlihatkan jika sektor industri mempunyai peran yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang lainnya dalam PDRB Kabupaten Klaten. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten

Klaten cukup besar dan selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya yang dibuktikan dengan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai berikut ini:

TABEL 1. 2.
Jumlah Unit Usaha di Sektor Industri Tahun 2017-2019

No	Sektor Industri	Jumlah Unit Usaha		
		2017	2018	2019
1.	Industri Besar	40	42	42
2.	Industri Menengah	3.129	3.140	3.152
3.	Industri Kecil	32.130	32.156	32.188

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2. menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun, sektor industri menengah dan industri kecil mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana tahun 2017 jumlah unit usaha pada industri besar sebesar 40 unit, kemudian tahun 2018 dan 2019 sebanyak 42 unit. Sedangkan industri menengah juga sama mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah unit usaha pada industri menengah yaitu sebanyak 3.129, 3.140 dan 3.152. Pada industri kecil pada tahun 2017 jumlah unit usaha sebanyak 32.130 mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 26 unit usaha dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 32.188 unit usaha. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Klaten dapat berkembang dengan pesat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Klaten untuk pengembangan industri daerahnya yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mana posisinya diapit oleh 2 (dua) kota besar yaitu Yogyakarta dan Solo. Meskipun Klaten lebih kecil dari Kota Yogyakarta dan Solo, Klaten tidak kalah dengan wisata yang ada di wilayahnya. Banyak sekali wisata yang ada di Klaten termasuk UMKM yang beragam jenis di Kabupaten Klaten. Salah satu usaha yang terkenal di Klaten yaitu kain tenun lurik. Usaha kain tenun lurik di Klaten sudah ada sejak puluhan tahun, dimana saat itu juga pemerintah sedang merencanakan Klaten menjadi Kota penghasil tenun lurik. Tenun lurik di Klaten dikenal dengan andalan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk memproduksi kain tenun lurik.

Beberapa Kecamatan di Klaten merupakan sentra pengrajin kain tenun lurik seperti Cawas, Bayat, Pedan, Trucuk dan masih banyak desa lainnya yang menjadi sentra kain tenun lurik. Tetapi setelah berkembangnya zaman, kain lurik mulai terganti dengan adanya industri tekstil yang menggunakan alat modern. Tetapi masih banyak juga pengusaha kain tenun lurik yang masih bertahan dengan cara melakukan inovasi produk tenun lurik. Kemudian pemerintah juga mengatur pengelompokan berbagai sentra industri yang termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2021. Adanya klaster industri ini bertujuan untuk mengakomodir para pengusaha yang bergerak di bidang sejenis dengan maksud untuk membentuk sebuah perkumpulan. Dilihat dari data menunjukkan bahwa klaster di Kabupaten Klaten sangat bervariasi seperti klaster kain, wisata, makanan, *handycraft* dan lain sebagainya. Saat ini klaster industri terbanyak di Kabupaten Klaten

memang diduduki oleh klaster industri makanan olahan. Selain industri makanan olahan, industri pengolahan lainnya yang diandalkan di Kabupaten Klaten yaitu industri konveksi kain yang sudah banyak tersebar di beberapa Kecamatan. Seperti industri kain tenun lurik yang ada di Kecamatan Trucuk yang saat ini merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra industri kain tenun lurik dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).

Dengan semakin banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Klaten, maka akan semakin banyak persaingan antar UMKM. Menurut Wiyadi (2008) dalam Rahmana Bintari & Setiartiti (2013) sebuah usaha akan lebih berdaya saing apabila adanya kerjasama yang baik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kontribusi dan dukungan pemerintah untuk pelaku-pelaku UMKM dengan cara melakukan pendampingan kepada UMKM yang masih baru agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Selain itu juga diperlukannya evaluasi untuk kemajuan UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi UMKM. Untuk itu pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kinerja usahanya agar dapat menghadapi persaingan dengan para pesaing.

Kinerja merupakan alat ukur untuk mengukur suatu keberhasilan sebuah usaha dalam mencapai tujuannya. Menurut Eniola dan Entebang (2016) kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang memiliki hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi. UMKM dalam menjalankan suatu usahanya harus mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan yang efektif. Literasi keuangan merupakan salah satu

indikator yang dapat mempengaruhi kinerja suatu UMKM. Hal tersebut dikarenakan literasi keuangan sangat penting bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Pemahaman mengenai literasi keuangan sangat bermanfaat bagi UMKM dalam mengoptimalkan kesejahteraan usahanya dan juga dapat melindungi usaha dari potensi kerugian.

Selain literasi keuangan yang memberikan dampak terhadap kinerja UMKM, adapun indikator-indikator lainnya yang dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk dijadikan sebagai evaluasi. Berikut merupakan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM menurut penelitian yang dilakukan Sudiarta *et al.* (2014) bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Hal tersebut dikarenakan jika kualitas SDM yang dimiliki suatu UMKM tinggi dan berkualitas maka akan menentukan kualitas kompetitif UMKM tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Widjaja *et al.* (2018) dan Mokodompit *et al.* (2019) bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja UMKM Karena semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki maka akan semakin tinggi juga kinerja UMKM yang didapatkan karena semakin luas pengetahuan atau ilmu manusia akan memberikan dampak yang baik dalam proses percepatan pemahaman dalam menggunakan alat produksi yang baru.

Faktor pemasaran dapat mempengaruhi kinerja suatu UMKM dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan Subroto *et al.* (2016) dimana faktor pemasaran sangat berdampak pada kinerja UMKM dikarenakan

jika usaha pemasaran yang dilakukan UMKM sudah benar dan melakukan inovasi atau perubahan maka akan berdampak terhadap kinerja UMKM yang semakin baik. Dengan adanya inovasi dalam pemasaran akan berdampak positif terhadap kinerja UMKM karena apabila semakin canggih dan semakin inovasi cara pemasaran UMKM maka akan semakin banyak dan efisien produk yang dijual. Selanjutnya faktor permodalan juga sangat penting bagi kinerja UMKM karena jika modal yang dibutuhkan tidak cukup maka akan menghambat proses produksi suatu usaha. Penelitian yang dilakukan Sudiarta *et al.* (2014) mengatakan bahwa permodalan mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM dimana semakin mudah akses permodalan yang didapatkan suatu UMKM maka akan meningkatkan kinerja UMKM.

Selain itu faktor lingkungan kerja juga sangat dibutuhkan, karena dengan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan membuat pekerjaan menjadi cepat dan lancar. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat mengganggu kinerja pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Qomariah (2016) bahwa faktor lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu UMKM. Fiansi dan Sarifuddin (2019) juga menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan Kusumawardhany (2018) jejaring sosial mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja UMKM karena penerapan strategi yang berkelanjutan pada UMKM yang dilakukan secara *online* bertujuan untuk mencapai tujuan yang strategis dengan adanya penciptaan

jaringan yang kuat untuk menjalin kemitraan sehingga modal dan investasi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM sangatlah banyak dan sudah dibuktikan dari penelitian sebelum-sebelumnya. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan kemudian peneliti mulai mengembangkan dan menambah indikator-indikator yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM agar berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti juga mengambil penelitian di Kecamatan Trucuk karena masih sedikit yang melakukan penelitian di daerah tersebut.

Kemudian peneliti ingin melakukan penelitian ini dikarenakan jika dilihat dari potensi kain tenun lurik di daerah Kecamatan Trucuk sangatlah bagus dan diperlukannya dukungan dari berbagai sektor untuk kembali mengunggulkan kain tenun lurik agar dapat bersaing dengan industri kain modern yang sekarang ini. Sehingga dari latar belakang yang dipaparkan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
2. Wilayah yang digunakan dalam penelitian hanya di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
3. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 6 variabel yang berpengaruh terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tenun lurik yaitu lingkungan kerja, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, permodalan, literasi dan jaringan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?

3. Bagaimana pengaruh Pemasaran terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
4. Bagaimana pengaruh Permodalan terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
5. Bagaimana pengaruh Literasi terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?
6. Bagaimana pengaruh Jaringan Sosial terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pemasaran terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Permodalan terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Literasi terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jaringan Sosial terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tenun Lurik Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan di bidang yang sama. Serta sebagai referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dan bahan masukan untuk pemerintah dalam mengambil

keputusan dan kebijakan dalam upaya pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).